

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

A. Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006).

Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*, Cet II, Kencana, Jakarta, 2005.

B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000).

B. Arief Sidharta (penerjemah), *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: P.T. Refika Aditama, 2008).

Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Janedri M. Gaffar, Sekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Makalah : *Kedudukan,, Fungsi, dan peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet II, Bayumedia, Malang, 2006.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006).

Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi, Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2004 oleh Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006).

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar Liberty*, Yogyakarta, 1995.

Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1959.

### B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

### **C. Peraturan**

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

### **D. Peraturan**

Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor Registrasi Perkara : 216/PHPU.D-VIII/2010 tentang perselisihan hasil pemilihan umum Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2010;

Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor Registrasi Perkara : 62/PHPU.D-XI/2013 tentang perkara perselisihan hasil pemilihan umum Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Provinsi Bali pada tahun 2013.

